

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Hubungan Internasional merupakan suatu bentuk interaksi antar Negara, baik yang dilakukan secara berkelompok, melalui instansi, maupun secara individu. Hubungan Internasional merupakan hubungan yang mencakup beragam aspek antar bangsa yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional suatu Negara tersebut. Kepentingan Nasional antar Negara dapat dicapai melalui berbagai cara yang berupa kerjasama, diplomasi, ataupun melalui perjanjian. Interaksi antar Negara yang terdapat dalam Hubungan Internasional berasal dari adanya tingkat *interdependency* dalam suatu Negara, serta pola kehidupan manusia dalam lingkup masyarakat internasional yang semakin kompleks sehingga tidak memungkinkan bagi actor Negara untuk menutup diri dari dunia luar (Robert & George, 1992:2). Konsep Hubungan Internasional memiliki kaitan yang erat dengan Politik Internasional, Hukum Internasional, Kerjasama Internasional, maupun Organisasi Internasional.

Di era globalisasi seperti pada masa sekarang ini, isu-isu yang tersebar di kancah internasional semakin kompleks, terutama pada permasalahan ketahanan pangan yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di berbagai Negara. Permasalahan krisis pangan telah menjadi isu yang mencemaskan banyak rakyat di dunia. Krisis pangan global adalah sebuah peristiwa dimana harga pangan global mengalami peningkatan yang sangat pesat sampai semakin tidak terjangkau oleh banyaknya elemen masyarakat hampir di seluruh belahan dunia. Untuk mengatasi masalah ini, Persatuan bangsa-bangsa (PBB) pada akhirnya membentuk sebuah organisasi internasional khusus untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terkait pada bidang pangan dan pertanian yang melanda banyak negara-negara di dunia, yaitu *Food and Agriculture Organization* (FAO).

FAO merupakan suatu organisasi khusus yang berada dibawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki kantor pusat di Roma, Italia.

FAO dibentuk sebagai sebuah organisasi yang bergerak pada bidang pangan dan pertanian, dan merupakan sebuah hasil dari Konferensi *United Nation Conference on Food and Agriculture* yang diselenggarakan pada tahun 1945 yang berlokasi di Amerika Serikat dan dihadiri oleh sebanyak 44 negara. Melalui konferensi ini, akhirnya muncul sebuah kesepakatan bersama bahwa pentingnya untuk membentuk sebuah organisasi internasional yang memiliki tugas utama berfokus pada bidang pangan dan pertanian dunia.

Indonesia memutuskan untuk bergabung kedalam keanggotaan FAO pada tanggal 28 November 1949. FAO dibentuk dengan bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada bidang pangan dan pertanian yang dapat mengganggu stabilitas pangan negara-negara di dunia. Sejak awal terbentuknya, FAO telah menanggung mandat yang sangat besar, yaitu membantu negara-negara yang membutuhkan untuk keluar dari permasalahan pangan yang muncul di negaranya. FAO juga memiliki tugas untuk membantu negara-negara yang menjadi anggotanya untuk mencapai taraf kesejahteraan dan ketahanan yang baik, sehingga tidak ada lagi negara yang mengalami krisis pangan.

Krisis pangan adalah sebuah proses terjadinya penurunan asupan pangan serta gizi pada masyarakat (Mukti, 2009). Krisis pangan pada dasarnya hampir menyerupai kelaparan, karena kelaparan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan energy karena adanya masalah daya beli ataupun ketersediaan atas pangan. Ketahanan pangan (*food security*) dalam suatu Negara dapat dikatakan sukses apabila berbagai permasalahan tersebut sudah teratasi.

Ketahanan pangan (*food security*) mencakup 3 aspek yang dapat digunakan sebagai indikator yaitu **Ketersediaan**, yang berarti bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. **Distribusi**, yaitu pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan harga stabil dan terjangkau oleh setiap kalangan rumah tangga. Dan yang terakhir adalah **Konsumsi**, yaitu setiap rumah tangga memiliki kemampuan untuk mengakses pangan yang cukup dan mengelola konsumsi sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan serta preferensinya. Terjadinya krisis pangan dapat dipengaruhi oleh beragam factor yang salah satunya adalah

akibat dari meningkatnya permintaan pangan global, terutama oleh China dan India, serta menciutnya lahan pertanian dan kekacauan iklim, jumlah pertumbuhan penduduk yang kian pesat setiap tahunnya, tingginya permintaan bahan bakar fosil, kebijakan lembaga keuangan internasional dan Negara maju, konversi lahan dan penurunan kualitas lahan pertanian, serta regulasi kebijakan pemerintah yang terkait dengan pertanian.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang keadaan pangannya kurang stabil. Namun, jika ditelusuri jauh lebih dalam lagi, melihat Indonesia merupakan sebuah Negara agraris dan sebagian besar rakyatnya berprofesi sebagai petani, sangat tidak mungkin apabila Indonesia mengalami masalah krisis pangan. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh dapat menjadi penyebab terjadinya krisis pangan, adalah :

1. Penduduk dunia yang semakin bertambah

Ketika penduduk semakin bertambah maka konsumsi dunia turut serta mengalami peningkatan. Tingginya permintaan ini disebabkan oleh semakin bertambah banyaknya penduduk-penduduk dunia dari setiap Negara setiap tahunnya. Laster Brown, Kepala Lembaga Kebijakan Bumi di Washington DC mengemukakan bahwa keterbatasan pangan dapat menyebabkan runtuhnya peradaban dunia saat ini. Menurut Brown, manusia mempertahankan kehidupannya dengan mengikis tanah dan menghabiskan persediaan air tanah lebih cepat dari pemulihannya.

2. Cuaca Ekstrem

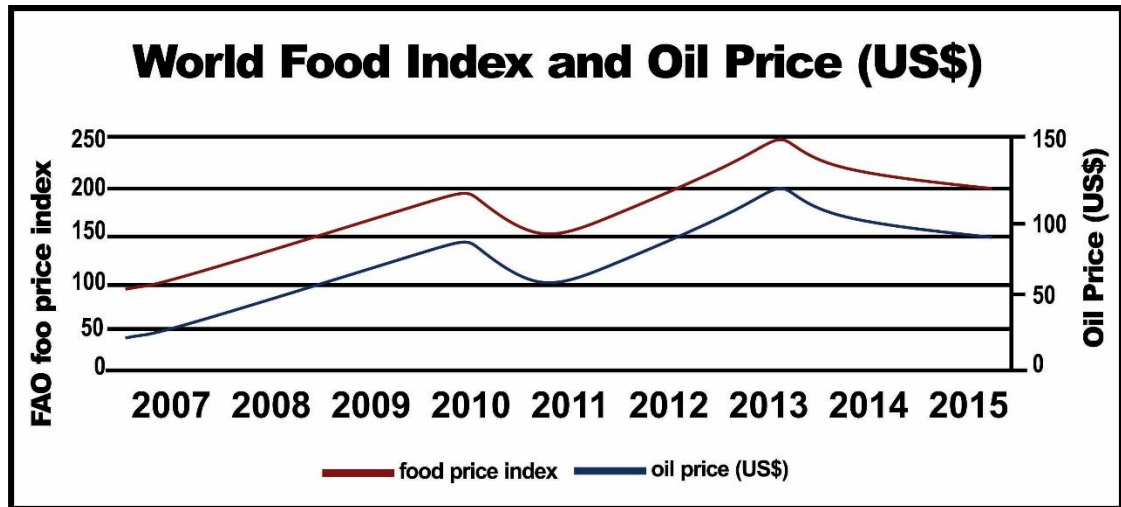
Perubahan cuaca cukup ekstrem yang terjadi di beberapa Negara termasuk salah satu faktor yang memberikan dampak negatif bagi produksipangan. Beberapa wilayah bahkan tidak hanya mengalami gagal panen, tetapi juga turut merusak lahan produksi sehingga kecukupan pangan bisa terganggu dalam waktu yang cukup lama.

3. Pembatasan Ekspor

Kenaikan harga pangan dunia juga dipicu oleh perlindungan persediaan pangan dalam negeri masing-masing negara sehingga menurunkan kuantitas jumlah ekspor bahan makanan di pasaran internasional. Direktur organisasi perdagangan dunia (WTO), Pascal Lamy, di Jenewa pada 22 January 2011, Swiss, mengemukakan bahwa pembatasan ekspor saat ini menjadi penyebab utama melonjaknya harga pangan dunia. Kebijakan tersebut mengkhawatirkan karena tidak hanya akan mengganggu harga pangan di pasaran, tetapi juga ancaman bagi negara-negara yang amat bergantung kepada pasokan impor untuk memenuhi kecukupan pangan mereka. Lamy mengungkapkan pembatasan ekspor telah memainkan peran utama dalam krisis pangan.

4. Trend Energi Alternatif Biofuel

Salah satu faktor penyebab krisis pangan dunia adalah kebijakan energi alternatif biofuel yang banyak dikembangkan di negara-negara industri maju. Jagung dan kelapa sawit misalnya, kedua pangan itu sebelumnya untuk konsumsi masyarakat dunia, tetapi saat ini banyak dijual untuk biofuel yang permintaannya cukup tinggi. Keterkaitan biofuel dengan kenaikan harga pangan memang sangat erat. Hal ini terjadi karena beberapa komoditi pangan kini dipergunakan sebagai bahan baku biofuel. Jika harga beli jagung dan kedelai untuk kebutuhan biofuel lebih tinggi dibanding harga beli untuk kebutuhan konsumsi, maka pelaku pasar memiliki kecenderungan untuk menjual hasil panen jagung dan kedelai mereka ke produsen biofuel. Seperti yang terjadi di Cina, pengalihan produksi jagung untuk biofuel menyebabkan kelangkaan pakan ternak di negara itu.

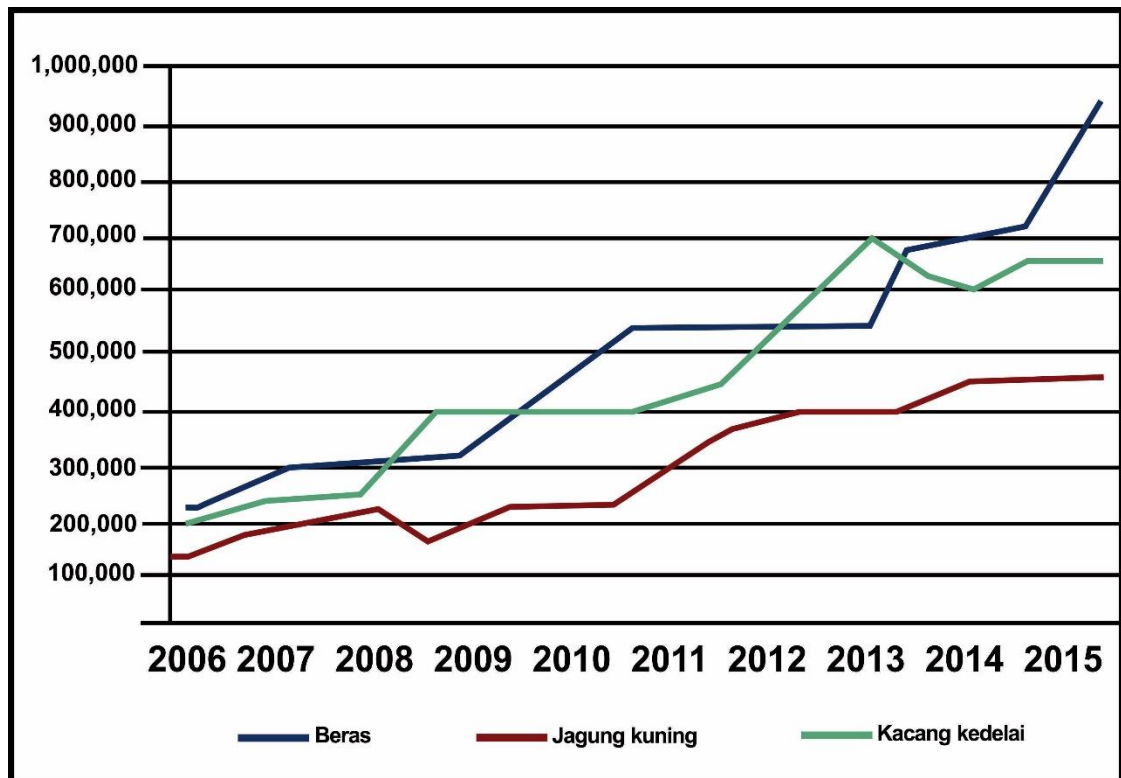


Indeks Harga Pangan dan Minyak Dunia tahun 2007-2015

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh FAO, dan penulis dapatkan melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, harga pangan dunia sejak tahun 2007 sampai tahun 2015 pada setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Grafik diatas menunjukkan harga minyak dunia dan harga pangan telah merangkak naik sejak tahun 2007 dan mengalami puncak kenaikan pada tahun 2010. Namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang juga diikuti oleh harga pangan dunia. Lalu pada tahun 2012 meningkat secara tajam hingga mengalami peningkatan di tahun 2013. Menurut penjelasan dari USDA (*United State Department of Agriculture*), meningkatnya harga minyak dunia turut memberikan pengaruh terhadap harga pangan global. Harga minyak mentah yang cukup tinggi, menyebabkan tiddinya biaya produksi dan distribusi pangan (USDA, 2008). Hubungan pengaruh harga minyak dunia terhadap pangan tersebut juga telah dibenarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, pada saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, bahwa gejolak harga pangan salah satu faktornya adalah dipengaruhi oleh gejolak harga minyak mentah pada kawasan global.

Data statistik FAO untuk neraca pangan (*Food Balance Sheet*) terutama beras digunakan untuk menggambarkan kondisi kesetimbangan ketersediaan dan konsumsi beras global serta nasional.



Grafik Harga Perdagangan Besar Pangan di Indonesia (Rupiah per Kuintal)

Sumber : Pusdatin Kementan

Meningkatnya harga pangan global juga turut berimbas kepada Indonesia. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa beberapa komoditas pangan penting cukup stabil sampai tahun 2009, namun mengalami peningkatan yang sangat tajam sejak tahun 2010, terutama pada komoditas beras yang setiap tahunnya mengalami kenaikan harga yang terbilang sangat tinggi. Selain itu, bahan pangan lain seperti kacang kedelai, yang dijadikan bahan baku beberapa pangan di Indonesia, turut mengalami peningkatan yang pesat, terutama pada tahun 2013. Hal tersebut tentunya memberikan berbagai dampak bagi Indonesia, karena meningkatnya harga bahan pangan nasional, maka jangkauan pada penduduk di Indonesia terhadap pangan juga semakin berkurang, terutama pada masyarakat miskin. Semakin tinggi kenaikan harga bahan pangan nasional, maka akan semakin sulit pula bagi para penduduk Indonesia untuk mendapatkan pangan yang dapat mencukupi kehidupannya.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjadikan pokok utama penulis dalam mengangkat penelitian adalah dengan Rumusan masalah yang terkait, yaitu **“Bagaimana Peran FAO Terhadap Ketahanan Pangan Nasional di Indonesia Periode 2010-2015 ?”**

I.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui gambaran mengenai keadaan pangan di Indonesia
1. Memahami tentang FAO sebagai Organisasi Pangan dan Pertanian
2. Menganalisa pengaruh dari adanya FAO terhadap ketahanan pangan di Indonesia

I.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penulis sangat mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa lain yang ingin mengetahui tentang ketahanan pangan di Indonesia serta upaya kerjasama yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan stabilitas pangan nasional.
2. Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian terkait selanjutnya.

I.5. Kerangka Teori

I.5.1 Teori Organisasi Internasional

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar Negara dengan Negara saja atau individu dengan Negara, tetapi juga antara Negara dengan organisasi internasional. Hal tersebut dikarenakan keberadaan organisasi internasional telah diakui keberhasilannya dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan dan konflik yang terjadi antar Negara. Organisasi internasional dapat diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas-batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu mesin kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama di antara pihak yang terkait dalam berbagai bidang. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap Negara, dimana ia berperan aktif didalamnya.

Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organizations*, Organisasi Internasional adalah suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Clive Archer menjelaskan bahwa peran yang dilakukan organisasi internasional adalah: pertama, organisasi internasional sebagai *instrument*, yaitu organisasi digunakan sebagai alat bagi Negara-negara anggotanya untuk mencapai kesepakatan, menekan konflik serta menyelaraskan tindakan. Kedua, sebagai *Arena*, yaitu organisasi internasional menjadi sebuah wadah untuk berkomunikasi untuk membahas berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh organisasi sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Ketiga, sebagai *Actor*, yaitu organisasi internasional dilihat sebagai actor internasional yang dapat membuat keputusan atau kebijakan bagi Negara-negara anggotanya (Archer, 2001:68).

Terdapat beberapa syarat sebuah organisasi dapat disebut sebagai organisasi internasional, diantaranya adalah (Archer, 2001:24) :

1. Tujuannya haruslah merupakan tujuan bersama (bersifat internasional);
2. Harus mempunyai anggota, dimana setiap anggota mempunyai hak suara;

3. Didirikan berdasarkan pada anggaran dasar dan harus mempunyai markas besar (*headquarters*) demi kelangsungan organisasi;
4. Pajabat/pegawai yang mempunyai tugas menjalankan pekerjaan organisasi harus terdiri dari berbagai bangsa/Negara.

Archer juga menyebutkan, bahwa menurut fungsinya, organisasi internasional memiliki 9 fungsi yang diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Articulation and aggregation*. Organisasi internasional memiliki fungsi untuk menampung, memproses, serta menyalurkan ide-ide, tuntutan dan kepentingan Negara-negara yang masuk kedalam keanggotaannya.
2. *Norms*. Organisasi internasional memiliki pengaruh didalam pembentukan norma-norma serta isu-isu mana yang perlu difokuskan dalam dunia internasional. Misalnya dalam *universal declaration of human rights* pada tahun 1948 kebutuhan pangan menjadi hal yang sangat penting dan menjadi norma yang berlaku di dunia internasional.
3. *Recruitment*. Fungsi ini yaitu merekrut Negara-negara anggota yang belum masuk kedalam keanggotaan. Hal ini memungkinkan Negara-negara yang belum berdaulat akan didukung oleh Negara-negara berdaulat untuk merdeka dan masuk kedalam anggota organisasi tersebut dan dapat menyampaikan kepentingan-kepentingan negaranya.
4. *Socialization*. Sosialisasi adalah sebuah proses menanamkan suatu ide yang ada di suatu lembaga kepada Negara-negara sehingga Negara tersebut dapat diterima oleh nilai-nilai yang ada di lembaga tersebut.
5. *Rule Making*. Disini dijelaskan bahwa organisasi internasional dapat membuat kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang mengikat kepada Negara-negara yang menjadi anggotanya.
6. *Rule Application*. Organisasi internasional menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan yang ada. Namun, dalam hal ini penerapannya diserahkan kepada Negara-negara anggotanya sebagaimana tidak ada otoritas sentral dalam lembaga atau agen untuk melakukan *rule application*.

I.5.2 Konsep Ketahanan Pangan

Menurut sejarah, istilah ketahanan pangan (*food security*) muncul karena adanya krisis pangan dan kelaparan. Istilah ketahanan pangan pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia terutama pada Negara-negara berkembang dari krisis produksi dan krisis suplai makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan. FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana suatu rumah tangga memiliki akses, baik secara fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Hal ini berarti konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan yang memadai, stabilitas, dan akses terhadap pangan-pangan utama. Ketersediaan pangan yang memadai mengandung arti bahwa secara rata-rata pangan harus tersedia dalam jumlah yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Stabilitas merujuk pada kemungkinan bahwa pada situasi sesulit apapun, seperti pada musim kering, konsumsi pangan tidak akan pernah jatuh dibawah kebutuhan gizi yang dianjurkan. Sementara, akses mengacu pada fakta bahwa masih banyak masyarakat yang mengalami kelaparan karena ketiadaan sumber daya untuk memproduksi pangan atau ketidakmampuan untuk membeli pangan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, ketahanan versi FAO adalah daya beli atau pendapatan yang memadai untuk memenuhi biaya hidup.

FAO juga mendefinisikan ketahanan pangan sebagai sebuah kondisi dimana semua masyarakat dapat memperoleh pangan yang aman dan bergizi untuk dapat hidup secara sehat dan aktif. Di satu sisi, untuk menikmati ketahanan pangan harus ada sebuah ketetapan tentang pangan yang aman dan bergizi, dari segi kualitas ataupun kuantitas. Disisi lain, terdapat ketetapan bahwa kaum miskin dan kaya, laki-laki ataupun perempuan, muda atau tua memiliki keterjangkauan untuk memperoleh pangan tersebut. Sementara definisi ketahanan pangan secara resmi disepakati oleh para pemimpin negara-negara anggota PBB pada *World Food Conference Human Right 1993* dan *World Food Summit 1996* adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan gizi setiap individu dalam jumlah dan mutu agar dapat hidup aktif dan sehat secara berkesinambungan sesuai budaya setempat. Sistem ketahanan

pangan dikatakan mantap apabila mampu memberikan jaminan bahwa semua penduduk setiap saat pasti memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan norma gizi untuk kehidupan yang sehat, tumbuh, dan produktif. Ancaman resiko atau peluang kejadian sebagian penduduk menderita kurang pangan merupakan indicator keragaan akhir dari sistem ketahanan pangan. Oleh karena itu, ketahanan pangan ditentukan oleh tiga indicator kunci, yaitu ketersediaan pangan (*Food Availability*), jangkauan pangan (*Food Access*), serta keandalan (*Reliability*) dari ketersediaan dan jangkauan pangan tersebut.

Konsep ketahanan pangan yang dijadikan pedoman bagi negara Indonesia adalah yang termuat didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, pasal 1 ayat 17 yang berisikan bahwa “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah ataupun mutunya, secara aman, merata dan terjangkau” (Eko, 2012:38). Undang-undang yang dijadikan pedoman oleh Indonesia ini selaras dengan arti ketahanan pangan yang dianut oleh FAO dan WHO pada tahun 1992, yaitu akses setiap rumah tangga atau individu untuk mendapatkan pangan dalam setiap waktu demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep ketahanan pangan nasional Indonesia yang termuat didalam UU tersebut memfokuskan pada akses kepada setiap rumah tangga masyarakat terhadap kecukupan pangan, mutu pangan, dengan diiringi harga yang terjangkau.

I.6. Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan ini penulis menggunakan referensi dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan keberadaan IFAD di Indonesia.

Tulisan pertama adalah jurnal yang berjudul “**Food and Agriculture Organization (FAO)**” yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia. Didalam jurnal ini dijelaskan bahwa adanya FAO adalah sebagai *specialized agency* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). FAO dibentuk pada tahun 1945, yang semula memiliki kantor yang berlokasi di Kanada, kemudian berpindah ke Roma tepat pada tahun 1951. FAO menanggung mandat yang besar

dalam melakukan tugasnya, yaitu untuk meningkatkan produktivitas pertanian, menunjang pertumbuhan ekonomi pada Negara-negara yang membutuhkan, meningkatkan standar kehidupan masyarakat di pedesaan, serta untuk memperbaiki gizi dan standar hidup masyarakat pedesaan. Hingga saat ini, FAO memiliki jumlah keanggotaan sebanyak 192 negara dan satu organisasi kelompok Negara (Uni Eropa).

Dalam jurnal ini juga dijelaskan selama menjalankan kegiatan guna kesuksesan mandat yang ditanggungnya, FAO memberikan bantuan pembangunan (*development assistance*) dan bantuan teknis (*technical assistance*) yang diberikan kepada Negara-negara yang memiliki masalah terkait bidang pangan serta pertanian dan membutuhkan adanya bantuan dari FAO dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, FAO juga menyelenggarakan berbagai kegiatan lainnya yang terkait dalam bidang pertanian seperti Sistem Informasi dan Peringatan Dini Global untuk Pangan dan Pertanian, Program Khusus untuk Ketahanan Pangan, Sistem Pencegahan Darurat Perpindahan Penyakit Menular dari Hewan dan Hama Pertanian, serta bantuan dan Rehabilitasi Darurat (*Emergency Relief and Rehabilitation*).

Selain itu, jurnal ini juga memuat sekilas tentang hubungan antara Indonesia dengan FAO, sejak pertama kali Indonesia memutuskan untuk bergabung ke dalam keanggotaan FAO pada tanggal 28 November 1949, dan FAO membuka kantor perwakilannya di Indonesia pada tahun 1979. Peran Indonesia di dalam keanggotaan FAO dapat terlihat melalui keterlibatan Indonesia yang aktif didalam berbagai kegiatan FAO. Keanggotaan Indonesia pada berbagai forum FAO, khususnya pada Dewan FAO dan Biro *Committee on World Food Security* (CFS) dapat membuka jalan untuk Indonesia dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia pada bidang ketahanan pangan. Semakin aktif Indonesia pada berbagai forum yang diadakan oleh FAO, maka permasalahan pangan di Indonesia perlahan juga dapat terselesaikan.

Tulisan kedua sebuah skripsi yang berjudul “**Peran Food and Agriculture Organization (FAO) Dalam Mengatasi Krisis Pangan di Kenya**” yang ditulis oleh Rina Purwati. Pada skripsi tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Kenya melakukan berbagai upaya demi untuk mengurangi tingkat krisis pangan di

negaranya. Mwai Kibaki yang saat itu mengemban amanah sebagai Presiden Kenya melakukan kerjasama dengan Jose Graziano da Silva selaku Direktur Jenderal FAO untuk memperoleh bantuan demi pemecahan permasalahan terkait pangan di Kenya pada saat itu. FAO memberikan dukungan terhadap kegiatan Konferensi Regional yang diberikan dalam bentuk dana sumbangan yang berasal dari Negara-negara anggota FAO serta melalui Negara donor lainnya, hal tersebut dimaksudkan agar dapat mengurangi tingkat krisis pangan di Kenya yang saat itu menjadi sebuah permasalahan besar yang wajib mendapatkan perhatian khusus dari berbagai elemen. Sebagai pemerintah yang memimpin sebuah Negara berkembang, Mwai Kibaki memiliki pendapat pentingnya untuk membawa Kenya bekerjasama dengan organisasi internasional, karena hal tersebut akan sangat membantu untuk mengurangi jumlah krisis pangan di Kenya.

Program-program yang telah dibentuk oleh FAO untuk Kenya dalam menangani masalah krisis pangan dalam bentuk *Technical Cooperation Programme* (TCP). Program ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kenya untuk meningkatkan produksi pangan dalam upaya untuk meringankan beban harga pangan yang tinggi terhadap masyarakat dan memperkuat kemampuan petani dalam skala kecil dan para peternak untuk mengatasi perubahan iklim. Dijalankannya program ini dengan target untuk membantu meningkatkan bahan makanan khususnya pada jagung dan beras untuk membantu para penduduk di Kenya mendapatkan pasokan bahan makanan yang cukup terutama dalam kondisi kekeringan berkelanjutan yang melanda Negara tersebut. FAO juga melakukan kegiatan *Multi Donor Trust Fund* (MDTF), yaitu sebuah bentuk pendanaan yang dilakukan melalui mitra sumber dana untuk mendukung prioritas nasional dalam memfasilitasi badan-badan PBB dalam bekerja memberikan koordinasi dan kerjasama. MDTF dapat dijadikan sebagai sebuah alat dalam kebijakan dan penyediaan dukungan untuk kemanusiaan dan kegiatan pembangunan. Program selanjutnya yang dijalankan oleh FAO dalam rangka memerangi krisis pangan adalah *Emergency and Rehabilitation Trust Fund* (OSRO), merupakan sebuah program yang baru akan dijalankan setelah adanya persetujuan dari Negara yang akan mendapat bantuan, program ini ditujukan untuk mengatasi situasi darurat/rehabilitasi.

Dalam tulisan ini juga dijelaskan bahwa FAO telah banyak memainkan perannya dalam upaya pengentasan krisis pangan di Kenya. Dalam mengatasi berbagai masalah terkait kerawanan pangan, FAO selalu lebih memfokuskan perhatiannya pada Negara-negara yang berada di kawasan dengan potensi kerawanan pangan yang tinggi, dengan terlebih dahulu mengatasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan dari adanya kenaikan harga pangan serta menambah jumlah pasokan bahan makanan. Dalam penanganan permasalahan yang dihadapi oleh Kenya, FAO memiliki peran sebagai inisiator dan fasilitator. Sebagai inisiator, FAO memiliki berbagai program kerja seperti *National Programme for Food Security* (NPSF) yang membahas permasalahan terkait ketahanan pangan nasional, dan bertujuan untuk menyediakan pangan untuk sementara ataupun dukungan tunai untuk rumah tangga dalam proses pembangunan aset komunal, program *National Accelerated Agriculture Input Access Project* (NAAIAP) yang bertujuan untuk membantu penerima dalam meningkatkan akses pertanian dan teknologi yang ditargetkan untuk para petani kecil, program *Agriculture Productivity and Income Generating Programmes* yang memiliki dua kegiatan yaitu pengembangan kapas yang bertujuan untuk mempromosikan pengembangan kapas melalui otoritas pengembang kapas, serta program pengembangan horticulture yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur irigasi untuk produksi dalam meningkatkan pemasaran di beberapa wilayah seperti Machakos, North Narok, Kajiado, Marakwet, serta South Meru, serta program yang terakhir adalah *Boosting Food Production Through Irrigated Agriculture Programme* yang bertujuan untuk meningkatkan bahan makanan khususnya pada jagung dan beras bagi para penduduk di Kenya dalam memasok makanan pada kondisi kekeringan yang berkelanjutan di Negara itu.

Selain bertindak sebagai inisiator, dalam masalah yang dihadapi oleh Kenya, FAO juga berperan sebagai fasilitator. FAO sebagai badan pangan memiliki tugas untuk menjalankan atau menciptakan suatu kerjasama dengan pihak lainnya yang juga terkait dengan sektor pangan dan pertanian. Dalam kasus ini, FAO menjalankan beberapa tindakan untuk dapat memfasilitasi pemerintah Kenya dengan organisasi internasional serta lembaga-lembaga donor yang lainnya, dengan

tujuan agar dapat memperoleh bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Kenya yang mendapatkan masalah kelaparan.

Tulisan ketiga adalah buku yang berjudul “**Laporan Perkembangan Kerjasama Teknis Kementerian Pertanian Dengan FAO dan Lembaga Donor Lainnya**” yang diterbitkan oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam buku ini menjelaskan tentang FAO secara singkat dan jelas. Terdapat pula sejarah dan profil singkat FAO sejak awal didirikan. Buku ini juga memuat sekilas tentang keanggotaan FAO, serta sumber pendanaan FAO yang dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu Dana *Extra Budgetary* yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek FAO seperti OSRO (Office for Sahelian Relief Operation), GCP (Government Cooperation Programme), dan GCSP (Government Cooperation Special Programme) serta dana Regular yang digunakan untuk Tehnical Cooperation Project (TCP), Technical Cooperation Project Facility (TCPF), Special Shortterm Consultant Fund (SSF), dan Telefood Special Fund. Berbagai proyek FAO yang telah berhasil dilakukan dalam kurun waktu sejak tahun 2001-2006 dan proyek FAO yang direncanakan untuk direalisasikan untuk tahun-tahun berikutnya. Didalam buku ini dijelaskan pula bahwa pada tahun 2013, Indonesia mendapat penghargaan dari FAO atas keberhasilan Indonesia dalam melaksanakan *Millenium Development Goals* (MDGs) 3 tahun lebih awal daripada yang direncanakan sebelumnya, yaitu pada tahun 2015. Penghargaan tersebut diterima oleh Menko Perekonomian yang saat itu jabatannya diamanatkan kepada Hatta Rajasa mewakili Pemerintah Indonesia yang dilaksanakan dalam *Special Event on “Recognizing Notable and Outstanding Progress in Fighting Hunger”*, yang digelar pada tanggal 16 Juni 2013 bertempat di Kantor Pusat FAO yang berlokasi di Roma, Italia.

I.7. Alur Pemikiran



I.8. Metode Penelitian

I.8.1. Pendekatan Penelitian

Dilihat melalui jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu mekanisme dan proses dalam suatu penelitian dimana peneliti berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta serta fenomena sosial yang ada di masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan di lapangan, kemudian melakukan sebuah analisa dan melakukan teorisasi sesuai dengan apa yang telah diamati. Penelitian yang dilakukan penulis menganalisa tentang bagaimana peran dari adanya FAO (*Food and Agriculture Organization*) terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

I.8.2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif dengan menggambarkan permasalahan yang ada dengan didasarkan pada fakta-fakta yang tersedia, kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan yang lainnya. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek tertentu, suatu kondisi, system pemikiran, ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada saat ini. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi,

gambaran faktual serta akurat mengenai fakta-fakta yang ada, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang sedang diteliti.

I.8.3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian yang penulis lakukan ini adalah jenis data primer dan sekunder. Pertama, data primer yang berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan di Indonesia serta kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan FAO dalam rangka mencapai kondisi ketahanan pangan Indonesia. Kedua, adalah data sekunder yang berkaitan dengan program serta proyek-proyek yang telah dijalankan oleh FAO di Indonesia pada tahun 2010-2015 dalam upaya membantu memperbaiki ketahanan pangan Indonesia.

I.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak dari Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian bagian Kerjasama Multilateral dan juga studi kepustakaan (*library research*), dimana penulis menggunakannya untuk mendapatkan data-data primer serta sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen resmi di tingkat nasional ataupun internasional. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui proses membaca, memahami, membandingkan, serta menganalisa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan media internet serta data-data yang lainnya terkait dengan penelitian ini.

I.8.5. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif lebih mementingkan ketepatan serta kecukupan data. Penekanan data penelitian kualitatif adalah Validitas datanya, yaitu kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi pada latar yang diteliti berdasarkan data wawancara, table dan sumber yang lainnya, lalu menjelaskan fenomena yang ada dibalik permasalahan tersebut. Pada hal ini, data yang didapatkan dihubungkan sehingga kemudian dapat ditarik kesimpulan

Pada kasus ini, penulis menemukan masalah mengenai kondisi ketahanan pangan Indonesia, dimana jumlah ketersediaan bahan pangan di Indonesia

mengalami ketidakseimbangan terhadap jumlah penduduk, yang kemudian penulis akan menganalisa peran dari adanya FAO terhadap ketahanan pangan di Indonesia tersebut

I.9. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan, latar belakang penulisan masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : PROFIL ORGANISASI FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION)

Dalam bab ini dijelaskan tentang profil Organisasi FAO (Food and Agriculture Organization), Pengaruh FAO terhadap Kebijakan Pangan Indonesia, serta membahas mengenai Perundang-undangan Pangan di Indonesia.

Bab III : PERAN FAO TERHADAP KETAHANAN PANGAN NASIONAL INDONESIA PERIODE 2010-2015

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran tentang kondisi pangan di Indonesia serta analisis pengaruh dari adanya program serta proyek-proyek FAO sebagai organisasi pangan dan pertanian terhadap ketahanan pangan nasional di Indonesia.

Bab IV : PENUTUP

Bab terakhir disini berisikan hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah penulis lakukan, serta terdapat kritik dan saran.